



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Genjot Pajak untuk Naikkan Anggaran 2019

Plafon Anggaran 2019 naik menjadi Rp 87,3 triliun..

### Linda Hairani

[linda.hairani@tempo.co.id](mailto:linda.hairani@tempo.co.id)

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta akan menggenjot penerimaan pajak demi menaikkan plafon anggaran tahun depan. Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengungkapkan plafon Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 adalah Rp 87,3 triliun, naik sekitar Rp 10 triliun dari APBD 2018.

Saefullah menjelaskan, target penerimaan pajak pada 2019 adalah Rp 41,175 triliun, naik sekitar Rp 6,05 triliun dari target tahun ini. Tiga pos pajak dengan target kenaikan terbesar adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Di luar pajak, menurut Saefullah, kawasan sektor pendapatan juga berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Nilainya naik Rp 2,1 triliun dari Rp 21,4 triliun tahun ini. "Semuanya sudah berdasarkan hasil kajian kami," kata Saefullah setelah rapat perdana pembahasan RAPBD 2019 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, kemarin.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI, Faisal Syafruddin, mengatakan pajak kendaraan bermotor tahun depan ditargetkan naik menjadi Rp 9,3 triliun. Pada APBD 2018, target penerimaan pajak kendaraan Rp 8 triliun. Faisal optimistis target itu tercapai lantaran kinerja perolehan pajak tahun ini tergolong baik. Hingga akhir September lalu, penerimaan pajak kendaraan setara 77,53 persen atau Rp 6,042 triliun.

Mulai tahun depan, menurut Faisal, Badan Pajak akan menggandeng Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan. Kedua instansi akan memblokir surat tanda nomor kendaraan yang pemilikinya telah membayar pajak hingga dua tahun. Kalau pemilik tidak patuh, "kendaraannya menjadi barang rongsokan," kata Faisal.

Faisal menambahkan, tren peningkatan jumlah kendaraan baru di Ibu Kota juga menjadi dasar kenaikan target penerimaan pajak. Dalam setahun, jumlah sepeda motor rata-rata bertambah sekitar 600 ribu unit. Adapun jumlah mobil rata-rata bertam-

bah 200 ribu unit. Hingga pertengahan tahun lalu, di Jakarta tercatat ada 3,6 juta unit mobil dan 13,7 juta unit sepeda motor.

Pemerintah DKI menggenjot sektor pendapatan untuk membiayai belanja daerah yang juga diproyeksikan meningkat. Menurut Saefullah, penggunaan anggaran tahun depan berfokus pada penanganan banjir, pengadaan rumah dengan harga terjangkau, serta pembelian lahan.

Alokasi dana penanganan banjir di wilayah utara dan timur Jakarta, misalnya, nilainya Rp 518 miliar. Adapun dana pembelian lahan untuk pelepasan sungai, situ, dan waduk dihabiskan Rp 850 miliar.

Mulai tahun depan, pemerintah DKI juga menganggarkan pinjaman daerah untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah tanpa uang muka alias *down payment* (DP) nol rupiah. Nilainya sekitar Rp 5,8 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana mengatakan APBD 2019 harus disahkan paling lambat akhir November. Jadwal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pem-

binan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sambil membahas rancangan APBD 2019, pemerintah DKI Jakarta juga masih menunggu evaluasi APBD 2018. Perubahan dari Kementerian Dalam Negeri. Anggaran perubahan 2018 disahkan akhir September lalu dengan volume akhir Rp 83,26 triliun. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Genjot Pajak untuk Naikkan Anggaran 2019

### Naik di Setiap Pos

VOLUME anggaran daerah DKI Jakarta tahun depan naik sekitar Rp 10 triliun dari anggaran tahun ini. Kenaikan terjadi di hampir semua pos, baik sisi pendapatan maupun belanja. Berikut ini perbandingan posur RAPBD 2019 dan APBD 2018.

Pos Anggaran	APBD 2018 (Rupiah)	Platan RAPBD 2019 (Rupiah)
<b>I. PENDAPATAN</b>	96,03 triliun	77,78 triliun
A. Pendapatan Asli Daerah	44,57 triliun	51,125 triliun
- Pajak daerah	38,12 triliun	44,18 triliun
- Retribusi	689,9 miliar	710,13 miliar
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	539,93 miliar	701,4 miliar
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah	5,21 triliun	5,53 triliun
B. Dana Perimbangan	21,40 triliun	22,6 triliun
- Dana bagi hasil	18,26 triliun	20,05 triliun
- Dana alokasi khusus non-fisik	3,14 triliun	3,46 triliun
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57,84 miliar	5,16 triliun
<b>II. BELANJA</b>	71,17 triliun	73,68 triliun
A. Belanja Tidak Langsung	30,99 triliun	33,14 triliun
B. Belanja Langsung	40,17 triliun	40,55 triliun
<b>III. PEMBIAYAAN</b>	5,14 triliun	4,10 triliun
A. Penerimaan	11,09 triliun	0,65 triliun
B. Pengeluaran	5,95 triliun	13,65 triliun
- Penyertaan modal daerah	5,31 triliun	7,81 triliun
- Pembayaran utang pokok	33,63 miliar	33,65 miliar
Pemberian pinjaman daerah (fasilitas pembiayaan perumahan): 5,81 triliun	<b>TOTAL</b> 77,12 triliun	87,34 triliun

SUMBER: PEMERINTAH DKI JAKARTA  
\* LINDA NIPANI